



PIDATO

PIMPINAN RAPAT PARIPURNA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
DENGAN ACARA PENYAMPAIAN LAPORAN RESES DAN
PENUTUPAN MASA PERSIDANGAN PERTAMA TAHUN 2022/2023
SERTA PEMBUKAAN MASA PERSIDANGAN KEDUA TAHUN 2022/2023
27 DESEMBER 2022

ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

YTH. SDR. GUBERNUR SUMATERA BARAT.

YTH. SDR. WAKIL KETUA DAN REKAN-REKAN ANGGOTA DPRD
PROVINSI SUMATERA BARAT.

YTH. SDR. SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN, STAF AHLI, KEPALA
BADAN, DINAS, KANTOR DAN LEMBAGA PROVINSI SUMATERA
BARAT.

YTH. PARA WARTAWAN DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA.

Mengawali Rapat Paripurna kita pada hari ini, marilah kita persembahkan puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan Rapat Paripurna dengan acara “ Penyampaian Laporan Hasil Pelaksanaan Reses Anggota DPRD Masa Persidangan Pertama tahun 2022/2023 dan dilanjutkan dengan Penutupan Masa Persidangan Pertama

Tahun 2022/2023 sekaligus Pembukaan Masa Persidangan Kedua Tahun 2022/2023”.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak/Ibu dan hadirin sekalian yang telah berkenan memenuhi undangan kami untuk dapat menghadiri Rapat Paripurna Dewan pada hari ini.

Dengan mengucapkan ”Bismillahirrahmanirrahim” Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan acara “ Penyampaian Hasil Pelaksanaan Reses Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Masa Persidangan Pertama Tahun 2022/2023 dan dilanjutkan dengan Penutupan Masa Persidangan Pertama Tahun 2022/2023 sekaligus Pembukaan Masa Persidangan Kedua Tahun 2022/2023” kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

..... (Ketokan Palu 3 Kali).

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Tata Tertib, Rapat Paripurna selain penetapan Rancangan Peraturan Daerah dan APBD, dihadiri sekurang-kurangnya separoh dari jumlah anggota DPRD.

.....
**Pimpinan Sidang membacakan daftar hadir
Anggota DPRD menurut Fraksi-Fraksi.**
.....

Memperhatikan kehadiran anggota Dewan yang terhormat pada Rapat Paripurna hari ini ternyata telah dihadiri lebih dari separoh jumlah anggota, berarti quorum telah tercapai, maka Rapat Paripurna Dewan telah dapat kita laksanakan.

Sdr. Gubernur dan Hadirin yang kami hormati;

Sesuai kedudukan Anggota DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dan juga sebagai wakil masyarakat di Lembaga DPRD sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Maka DPRD berkewajiban untuk menampung dan memperjuangkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya sebagai salah satu bentuk perwujudan representasi setiap Anggota DPRD yang telah dipilih oleh masyarakat.

Reses sebagai salah satu wadah yang secara resmi disediakan bagi setiap Anggota DPRD untuk menampung dan menghimpun aspirasi dari masyarakat yang pelaksanaannya dilakukan pada setiap masa persidangan.

Berdasarkan Keputusan Rapat Badan Musyawarah, reses Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk Masa Persidangan Pertama Tahun 2022/2023 dilaksanakan secara perorangan dari tanggal 23 sd 30 Oktober 2022.

Sesuai dengan jadwal kegiatan reses tersebut, Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat telah turun ke daerah pemilihannya untuk bertemu secara langsung dengan masyarakat dalam rangka menjemput dan menampung aspirasi dari masyarakat yang diwakilinya serta sekaligus mensosialisasikan program kerja pemerintah daerah kepada masyarakat.

Dari kunjungan reses tersebut, cukup banyak aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat kepada masing-masing Anggota DPRD, termasuk aspirasi-aspirasi sebelumnya yang belum ditindak lanjuti.

Aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat kepada masing-masing Anggota Dewan pada waktu pelaksanaan reses, merupakan amanat yang harus diperjuangkan oleh anggota Dewan dalam kapasitasnya sebagai perwakilan masyarakat di lembaga Dewan yang terhormat ini.

Oleh sebab itu, hasil pelaksanaan reses tersebut akan kami sampaikan secara resmi kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk dapat dijadikan sebagai bagian dari pokok-pokok pikiran DPRD dan dimasukkan dalam program dan kegiatan pembangunan daerah.

Saudara Gubernur dan Hadirin yang kami hormati;

Laporan Hasil pelaksanaan Reses Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Masa Persidangan Pertama Tahun 2022/2023 telah dihimpun oleh Sekretariat DPRD. Laporan tersebut selanjutnya akan kami serahkan secara resmi kepada Sdr. Gubernur pada Rapat Paripurna ini untuk dapat diakomodir dalam program dan kegiatan pembangunan daerah.

Untuk itu, kami minta kepada Sdr. Gubernur untuk dapat menerima hasil pelaksanaan reses Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Masa Persidangan Pertama Tahun 2022/2023.

.....

(Penyerahan Secara Resmi Oleh Pimpinan DPRD
Kepada Gubernur Sumatera Barat)

Dengan telah diserahkan secara resmi hasil pelaksanaan reses Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Masa Persidangan Pertama Tahun 2022/2023 kepada Sdr. Gubernur, maka acara Rapat Paripurna kita lanjutkan dengan agenda kedua yaitu Penutupan Masa Persidangan Pertama Tahun 2022/2023 dan sekaligus pembukaan Masa Persidangan Kedua Tahun 2022/2023.

Sdr. Gubernur dan Hadirin yang kami hormati;

Sesuai dengan pembagian masa persidangan pada Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2022, maka penutupan Masa Persidangan Pertama DPRD

Provinsi Sumatera Barat jatuh pada tanggal 27 Desember 2022.

Sebelum Masa Persidangan Pertama ini kita tutup, terlebih dahulu kami akan menyampaikan rangkuman tentang keadaan dan kondisi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2022/2023 ini.

Sesuai dengan 3 (tiga) fungsi strategis yang dimiliki DPRD yaitu Fungsi Pembentukan Perda, Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka pelaksanaan ketiga fungsi tersebut merupakan wujud dari DPRD sebagai kerangka perwakilan masyarakat di daerah.

Selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2022/2023 pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD tersebut, telah berlangsung dengan sangat dinamis dan demokratis dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah walaupun belum seluruhnya memperoleh target akhir seperti yang diharapkan.

Dalam pelaksanaan Fungsi Pembentukan Perda, Dewan bersama Pemerintah Daerah telah melakukan :

1. Penetapan Ranperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diterima hasil fasilitasnya melalui Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 188.34/4060/OTDA/2022 tanggal 13 Juni 2022 dan telah dilakukan klarifikasi terhadap hasil fasilitasnya dan ditetapkan menjadi Perda dalam Rapat Paripurna tanggal 12 September 2022.
2. Pembahasan terhadap 4 Ranperda yaitu :
 1. Ranperda tentang Tanah Ulayat yang sedang dilakukan pembahasan oleh Komisi 1, namun belum dapat dituntaskan karena masih perlunya pengayaan dan pendalaman terhadap materi tanah ulayat tersebut karena membuat aturan terhadap tanah ulayat di Provinsi Sumatera Barat memang diperlukan kehati-hatian karena menyangkut seluruh stake holder terkait baik dari lingkup nagari, suku maupun kaum dan masyarakat penggunaan tanah ulayat itu sendiri. sehingga diharapkan nantinya ranperda tanah

ulayat tersebut setelah ditetapkan dapat memenuhi dan mewakili kebutuhan masyarakat Sumatera Barat.

2. Ranperda tentang Tata Kelola Komoditi Unggulan Daerah yang sedang dilakukan pembahasannya oleh Komisi II dan juga belum dapat dituntaskan pembahasannya karena masih perlu penambahan materi terkait standarisasi mutu komoditi unggulan yang mengacu kepada SNI, mekanisme rantai pasok komoditi unggulan sehingga lebih optimal, Sistem dan Informasi dalam rangka keterbukaan informasi harga komoditi unggulan, pembinaan dan pengawasan dan serta sanksi.
3. Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang juga belum dapat dituntaskan karena perlunya penambahan materi terkait penanggulangan bencana pada masa pra bencana, tanggap bencana maupun pasca bencana,, kelembagaan, kerjasama, koordinasi dan penganggaran terkait penanggulangan bencana.

4. Ranperda tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif yang telah selesai dilakukan pembahasannya oleh Komisi V dan akan disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri Untuk difasilitasi.
5. Penetapan Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun 2022 dan Ranperda tentang APBD Tahun 2023.
6. Penetapan Propemperda Tahun 2023 yang telah menetapkan 12 ranperda yang akan dibahas pada Tahun 2023.

Dalam pelaksanaan fungsi anggaran, DPRD bersama Pemerintah Daerah telah menetapkan KUPA-PPAS Perubahan Tahun 2022 pada tanggal 1 September 2022 yang dilanjutkan dengan pembahasan dan penetapan Ranperda Perubahan APBD Tahun 2022 pada Rapat Paripurna tanggal 4 Oktober 2022. Disamping itu DPRD juga telah menyelesaikan pembahasan APBD Tahun 2023 pada Rapat Paripurna tanggal 26 November 2022.

Memperhatikan agenda pembahasan dan penetapan Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun 2022 dan

Ranperda tentang APBD Tahun 2023, kita telah mematuhi jadwal yang ditetapkan dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Namun demikian yang menjadi perhatian, adalah bagaimana Perubahan APBD Tahun 2022 dan APBD Tahun 2023 yang ditetapkan secara tepat waktu, realisasinya juga mesti tinggi.

Selanjutnya terkait dengan Ranperda APBD Tahun 2023, kami mengingatkan kepada Pemerintah Daerah, bahwa sampai Hari ini, kita belum lagi menerima hasil evaluasi dari Kemendagri. Agar tidak terjadi keterlambatan dalam penetapan APBD Tahun 2023, maka DPRD mendorong Pemerintah Daerah untuk lebih meningkatkan koordinasi dengan Kemendagri, kiranya hasil evaluasi Ranperda APBD Tahun 2023 dapat kita terima dalam waktu dekat.

Sedangkan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2022/2023, Sesuai dengan lingkup fungsi pengawasan, DPRD melalui komisi-komisi telah melakukan kegiatan pengawasan terhadap

pelaksanaan Perda dan Peraturan Gubernur yang menjadi peraturan pelaksana dari Perda tersebut, pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan OPD yang telah dialokasikan dalam APBD Provinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan baik dalam bentuk rapat maupun kunjungan kerja lapangan.

Hasil-hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh DPRD tersebut, hendaknya dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Daerah dalam perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan. Dan kepada Komisi-Komisi, kami mengingatkan juga untuk dapat melakukan pengawasan pula terhadap pelaksanaan rekomendasi yang diberikan kepada Pemerintah Daerah.

Demikianlah kegiatan DPRD sepanjang Masa Persidangan Pertama Tahun 2022/2023. Berkaitan dengan hal tersebut, Sekretariat DPRD telah menghimpun laporan kegiatan masing-masing alat kelengkapan DPRD yang dirangkum menjadi laporan kinerja DPRD Provinsi Sumatera

Barat Masa Persidangan Pertama Tahun 2022/2023. Untuk itu, diminta kepada Sdr.Sekretaris DPRD membacakan rangkuman kegiatan DPRD pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2022/2023.

.....

Penyampaian Rangkuman Kinerja DPRD Masa Sidang Ketiga Pertama Tahun 2022/2023

.....

Terima kasih disampaikan kepada Sdr. SekretarisDPRD yang telah membacakan rangkuman kegiatan DPRD pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2022/2023.

Dari rangkuman yang dibacakan Sdr. Sekretaris DPRDtersebut,kita sudah dapat mengetahui kinerja dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan DPRD selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2022/2023. Dari pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, diantaranya :

1. Kinerja pelaksanaan fungsi pembentukan perda sangat rendah, dari 12 target kinerja Propemperda Tahun 2022,

hanya 3 ranperda yang dapat ditetapkan yaitu ranperda kumulatif terbuka yaitu Pertanggungjawaban APBD Tahun 2021, Perubahan APBD Tahun 2022 dan APBD Tahun 2023. Sedangkan satu ranperda yang telah selesai pembahasannya yaitu Ranperda tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif belum dapat ditetapkan karena baru masuk ketahap fasilitasi.

Oleh sebab pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2022/2023, DPRD bersama Pemerintah Daerah bersama-sama hendaknya mematuhi target pembahasan Ranperda yang telah ditetapkan dalam Propemperda Tahun 2023 karena jadwal penyampaian fasilitasi ke Kementerian Dalam Negeri adalah sampai akhir November setiap tahunnya. Sehingga kejadian yang sam tidak berulang setiap tahunnya.

2. Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan, DPRD telah cukup banyak memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah melalui OPD terkait berupa rekomendasi dari hasil pengawasan DPRD lainnya. Namun, DPRD berharap agar progress tindak lanjut yang

telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui OPD terkait juga disampaikan dan diinformasikan kepada DPRD.

- 3. Disiplin dan kinerja Anggota DPRD pada masa persidangan pertama tahun 2022/2023 belumah maksimal. Tingkat kehadiran anggota DPRD pada setiap rapat-rapat perlu lebih ditingkatkan. Untuk itu, Fraksi-Fraksi kami harapkan dapat mendorong kinerja anggota Fraksinya, untuk dapat hadir pada setiap rapat-rapat DPRD. Apalagi tahun 2023 yang merupakan tahun politik, maka agenda kegiatan DPRD akan dilaksanakan dengan agenda politik tersebut. Untuk itu, butuh komitmen yang tinggi dari seluruh anggota DPRD, agar kedua agenda tersebut, dapat dilaksanakan secara bersamaan.**

Sdr. Gubernur dan Hadirin Yang Kami Hormati;

Dengan telah dibacakannya laporan kinerja DPRD pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2022/2023, maka kita tutup Masa Persidangan Pertama Tahun 2022/2023 secara

resmi dengan membacakan “ Alhamdulillahirabbilalamin “ dan sekaligus kita buka masa persidangan Masa Persidangan Kedua Tahun 2022/2023 dengan membacakan “Bismillahirrahmanirahim”

..... (ketukan palu 1x)

Pada masa persidangan Kedua Tahun 2022/2023 yang akan dimulai dari tanggal 28 Desember sd 27 April 2023, terdapat beberapa agenda utama diantaranya penyelesaian 3 ranperda yaitu ranperda tentang Tanah Ulayat, Ranperda tentang Tata Kelola Komoditi Unggulan dan Ranperda tentang Penanggulangan Bencana serta mempercepat kegiatan lainnya baik penyelesaian target Propemperda Tahun 2023 serta melakukan Uji Kepatutan dan Kelayakan terhadap Calon Anggota Komisi Informasi Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan 2023-2027 oleh DPRD Provinsi Sumatera Barat sebagaimana yang telah disampaikan oleh Gubernur Sumatera Barat serta harmonisasi beberapa ranperda usul inisiatif untuk segera dapat dilakukan pembahasan sehingga target kinerja pemerintah daerah Tahun 2023 dapat tercapai.

Sehubungan dengan hal tersebut, DPRD mengharapkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyiapkan semua dokumen terkait dan menyampaikannya tepat waktu kepada DPRD, sehingga pembahasan dan penetapannya sesuai dengan skedul yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Sdr. Gubernur dan Hadirin yang Kami Hormati;

Dengan telah ditutupnya Masa Persidangan Pertama Tahun 2022/2023 dan dibukanya Masa Persidangan Kedua Tahun 2022/2023, maka selanjutnya kita minta pula kepada Saudara Gubernur untuk dapat menyampaikan sambutannya. Untuk itu, kepada Sdr. Gubernur kamipersilahkan.

.....

Sambutan Gubernur Sumatera Barat

.....

Terima kasih kami sampaikan kepada Sdr. Gubernur yang telah memberikan sambutannya pada rapat paripurna ini.

Untuk lebih hikmatnya acara ini marilah kita bermunajad kehadiran Allah Subhana Wataala serta berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Pejabat Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat.

Untuk itu kepada Saudara Pejabat Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, kami persilahkan!.

.....

Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Pejabat Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat yang telah memimpin pembacaan Doa mudah-mudahan Allah Subhana Wataala dapat mengabulkan Doa dan memberikan berkah kepada kita semua hendaknya Aamiin.

Rapat Paripurna dan Hadirin yang Kami Hormati;

Dengan telah disampaikan laporan pelaksanaan reses dan laporan kinerja DPRD pada Masa Persidangan Pertama

Tahun 2022/2023, maka berakhir pulalah rapat paripurna kita pada hari ini.

Sebelum Rapat Paripurna ini kami tutup, perlu kami sampaikan bahwa sesuai dgn keputusan rapat Badan Musyawarah tanggal 1 November 2022 telah dijadwalkan pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat yang direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 28 s.d 31 Desember 2022. Berhubung penerbitan rekomendasi dari BPSDM Kementerian Dalam Negeri tidak dapat di proses pada akhir tahun, maka Kegiatan Bimbingan Teknsi tersebut tidak dapat dilaksanakan, dan pada tanggal tersebut diganti dengan melaksanakan kegiatan pengawasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi komisi-komisi. Sesuai dgn ketentuan pasal 46 ayat (2) PP 12 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa perubahan agenda kegiatan DPRD yg telah ditetapkan dalam rapat Badan Musyawarah hanya dapat dirubah pada rapat paripurna. sehubungan dgn hal tsb kami mintakan persetujuan dari rekan-rekan anggota DPRD apakah setuju kegiatan Bimbingan Teknis Pimpinan dan Anggota DPRD yang

direncanakan pada tanggal 28 s.d 31 Desember 2022 dirubah menjadi kegiatan pengawasan komisi-komisi sesuai tugas pokok dan fungsi komisi?.....apakah dapat menyetujuinya ?

..... (ketukan palu 1 x)

Akhirnya, dengan mengucapkan "Alhamdulillah" Rapat Paripurna pada hari ini, secara resmi kami tutup terlebih dahulu kami menyampaikan permohonan maaf pada undangan dan hadirin sekalian, apabila dalam pelaksanaan Rapat Paripurna ini terdapat hal-hal yang tidak berkenan pada kita semua..

..... (ketukan palu 3x)

Terima kasih.

Billahitaufiq walhidayah

Wss.Wr.Wb